

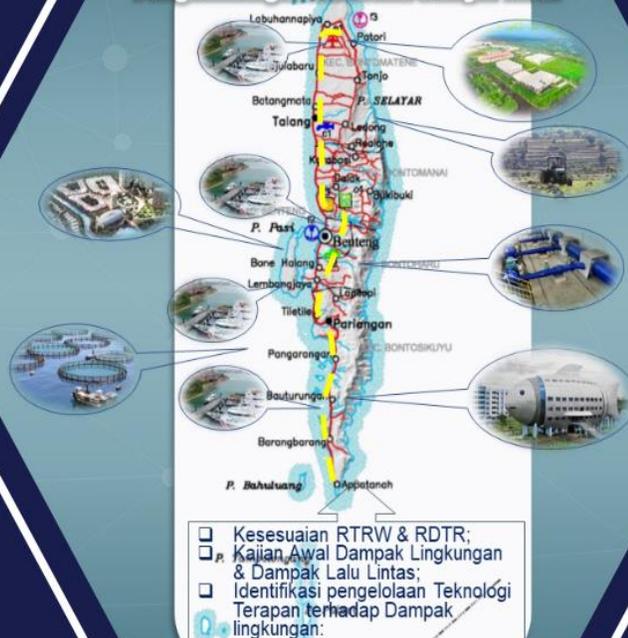


# RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas PMPTSP

## Masterplan Pengembangan Investasi Selat 2025



Gatot Subyargo Wijayadi, Kementerian Investasi/BKPM, November 2024



## KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47). Kemudian terakhir diubah statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PMPTSP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (Performance) satuan kerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar mutlak diperlukan guna membangun persepsi dan komitmen di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2026.

Rencana Kerja sangat penting bagi upaya pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan karena hal yang akan diungkapkan dalam Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya adalah indikator sasaran (outcome) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah outcomes sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya adalah penetapan besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun berjalan.

Benteng, 10 Juni 2024

Kepala Dinas PMPTSP,  
  
**Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660507 198603 1 022

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU 2023 .....	6
A. Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2023 .....	6
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP .....	19
C. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
D. Penelaahan Dokumen Perencanaan Bidang Teknis Terkait .....	33
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN ..	35
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	35
B. Analisis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan .....	35
C. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMPTSP .....	36
D. Program , Kegiatan, dan SubKegiatan .....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	72
A. Rencana Kerja .....	72
B. Pendanaan .....	72
BAB V PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan .....	74
B. Rencana Tindak Lanjut .....	74

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) awalnya kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (KPTPM) dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010. Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang kondusif bagi investasi, Status Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPTPM) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PMPTSP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Renja Perangkat Daerah di samping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh *stake holder* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD.

Renja Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan Tahun 2025. Adapun berhasil dan tidaknya Renja Perangkat Daerah ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sebagaimana Telah Diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sebagaimana Telah Diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
17. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
21. Peraturan Bupati kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan Daerah Tahun 2023-2028;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana Induk pembangunan kepariwisataan Tahun 2019-2034;
24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786).

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk 1 Tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehinggadapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

## **D. SISTEMATIKAN PENULISAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN LALU**

- F. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas PMPTSP;
- G. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP;
- H. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMPTSP;
- I. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- E. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- F. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMPTSP;
- G. Program dan Kegiatan.

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PMPTSP**

### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

Kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Berikut ini dapat dilihat hasil pengukuran kinerja :

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023**

Rencana Awal (Ranwal) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD yang akan dilaksanakan. Dalam dokumen Rencana Awal, tertuang tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana awal yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program dan kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan pada 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja DPMPTSP Tahun 2023 dapat direalisasikan sesuai dengan target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dapat diuraikan berdasarkan akuntabilitas kinerja dan realisasi fisik anggaran dibawah ini:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas PMPTSP
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome program ini ada 2 (dua) yaitu Persentase Capaian Kinerja dan Persentase Capaian Keuangan.

Pada Tahun 2022, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 60,00% dan terealisasi sebesar 60,77% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 81,69%.

Pada Tahun 2023, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 65,00% dan terealisasi sebesar 60,77% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 94,57%.

Untuk Tahun 2024, Target Renstra pada indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 70,00% dan indikator persentase capaian keuangan ditargetkan sebesar 75,00% dan perkiraan Tingkat Capaian Realisasi adalah 100% untuk kedua indikator capain tersebut.

#### b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome program ini yaitu Persentase Capaian Kinerja dan Persentase Capaian Keuangan.

Pada Tahun 2022, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 40,00% dan terealisasi sebesar 40,00% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 97,54%.

Pada Tahun 2023, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 60,00% dan terealisasi sebesar 60,00% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 96,64%.

Untuk Tahun 2024, Target Renstra pada indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 80,00% dan indikator persentase capaian keuangan ditargetkan sebesar 100% dan perkiraan Tingkat Capaian Realisasi adalah 100% untuk indikator capain tersebut.

#### c) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome program ini yaitu Persentase Capaian Kinerja dan Persentase Capaian Keuangan.

Pada Tahun 2022, indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 96,18%.

Pada Tahun 2023, indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 99,83%.

Untuk Tahun 2024, Target Renstra pada indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 80,00% dan indikator persentase capaian keuangan ditargetkan sebesar 100% dan perkiraan Tingkat Capaian Realisasi adalah 100% untuk indikator capain tersebut.

d) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome program ini yaitu Persentase Capaian Kinerja dan Persentase Capaian Keuangan.

Pada Tahun 2022, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 24,66% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 81,26%.

Pada Tahun 2023, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi di atas 100,00% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 96,64%.

Untuk Tahun 2024, Target Renstra pada indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 100,00% dan indikator persentase capaian keuangan ditargetkan sebesar 100% dan perkiraan Tingkat Capaian Realisasi adalah 100% untuk indikator capain tersebut.

e) Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome program ini yaitu Persentase Capaian Kinerja dan Persentase Capaian Keuangan.

Pada Tahun 2022, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 231,03 % sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 99,98%.

Pada Tahun 2023, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 201,62% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 99,67%.

Untuk Tahun 2024, Target Renstra pada indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 100,00% dan indikator persentase capaian keuangan ditargetkan sebesar 100% dan perkiraan Tingkat Capaian Realisasi adalah 100% untuk indikator capain tersebut.

f) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome program ini yaitu Persentase Capaian Kinerja dan Persentase Capaian Keuangan.

Pada Tahun 2022, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 99,66%.

Pada Tahun 2023, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 99,69%.

Untuk Tahun 2024, Target Renstra pada indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 100,00% dan indikator persentase capaian keuangan ditargetkan sebesar 100% dan perkiraan Tingkat Capaian Realisasi adalah 100% untuk indikator capaian tersebut.

## 2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022, realisasi anggaran Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar pada mencapai 94,57% dari total anggaran sebesar Rp. 3.244.109.850,- (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.174.498.335,- (Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan keberhasilan namun di sisi lain juga menunjukkan belum maksimalnya dalam pencapaian target yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, di antaranya:

- a. Peluang investasi yang dipromosikan masih dalam tahap penyusunan Investmen Project Ready to Offer (IPRO);
- b. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini;
- c. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP sebab tidak semua Tim Teknis bergabung di MPP setiap hari kerja;
- d. Tidak semua investor membuat laporan /LKPM melalui aplikasi OSS;

- e. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dianggap penting untuk menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain:

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
- b. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
- c. Melakukan pembenahan pada setiap kegiatan berbasis aplikasi sehingga pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lebih efisien;
- d. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan vertikal dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
- e. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi melalui pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset;
- f. Melakukan koordinasi Kepada Perangkat Daerah pengolah rekomendasi untuk mempedomani SOP PTSP dalam memproses rekomendasi;
- g. Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor.

**TABEL T-C.29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA TAHUN 24)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TAHUN BERJALAN			
					TARGET RENJA TAHUN (2023)	REALISASI RENJA TAHUN (2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		<b>URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>										
2.	18.	1										
2.	18.	1.	2.01									
			0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	
			0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
			0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
			0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Laporan	
			0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	
2.	18.	1.	2.01	0007	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	100%
2.	18.	1.	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
			0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	49 Orang/ bulan	26 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	98,19 %	26 Orang/ Bulan	

				0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Laporan		
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	14 Dok	1 laporan	1 laporan	100%	3 Laporan		
				0004	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12 Dokmen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	12 Dokumen		
				0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
				0006	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dokumen		
				0007	Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Laporan		
				0008	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Laporan		
2.	18.	1.	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen							
				0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
				0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
				0004	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
				0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan							
				0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1 Dokumen						
				0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
2.	18.	1.	2.05		<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				0001	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	ASN	-	-	-	-	-		
				0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	ASN	-	-	-	-	-		
				0003	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-		
				0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-		
				0005	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	-	-		
				0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	-	-	-	-	-		
				0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	-	-	-	-	-		

				0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	-	-	-	-	-		
				0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	-	-	-	-		
				0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Orang	-	-	-	-	-		
				0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang- undangan	Orang	-	-	-	-	-		
2.	18.	1.	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum kantor</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-		
				0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-		
				0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-		
				0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-		
				0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	-		
				0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	-		
				0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-		
				0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	-	-		
				0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100%	-		
				0010	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-		
				0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-		
2.	18.	1.	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan BMD</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	-	-	-	-	-		
				0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	-	-	-	-		
				0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-		
				0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-		
				0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	25 unit	2 unit	2 unit	-	-		
				0006	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	-	-	-	-		
				0007	Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	-	-	-	-	-		
				0008	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1 unit	-	-	-	-		







				0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku	13 Kegiatan Usaha	58 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	79 Kegiatan Usaha	76,45%	13 Kegiatan Usaha		
2.	18.	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)</b>	<b>60,000</b>	<b>12,826</b>	<b>52,000</b>	<b>76,286</b>	<b>66,98%</b>	<b>56,000</b>		
2.	18.	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	60,000	12,826	52,000	76,286	66,98%	56,000		
				0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan usaha					Kegiatan Usaha		
				0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	204 Pelaku Usaha	288 Pelaku Usaha	204 Pelaku Usaha	251 Pelaku Usaha	59,59%	204 Pelaku Usaha		
				0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan usaha	58 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	79 Kegiatan Usaha	76,45%	13 Kegiatan Usaha		
2.	18.	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2.	18.	6	2.		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten</b>	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>12 Dokumen</b>		
				0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		

## **B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pemerintah dalam peningkatan daya saing investasi secara nasional yang implementasinya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara nasional.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Selayar akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pengusaha regional, nasional, dan internasional dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan realisasi investasi, iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang penanaman modal serta perizinan usaha dan perizinan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah:

1. Peningkatan layanan dan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik;
2. Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Pelaksanaan perencanaan, promosi, kerjasama dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Melakukan inovasi Promosi investasi melalui Penyusunan IPRO Pariwisata, IPRO Minapolitan dan IPRO Kawasan Industri Selayar pada Forum South Sulawesi Investmen Challenge (SSIC) tingkat provinsi dan pada Forum ALKI II;
5. Pelaksanaan perizinan usaha melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta monitoring;
6. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service;
7. Memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
8. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan;
10. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

**Tabel T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
						Tahun 2023 (THN n-2)	Tahun 2024 (THN n-1)	Tahun 2025 (THN n)	Tahun 2026 (THN n+1)	Tahun 2023 (THN n-2)	Tahun 2024 (THN n-1)	Tahun 2025 (THN n)	Tahun 2026 (THN n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP</b>		75,00%	65,00	70,00	75,00	80	64,63		75,00	80	
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP		65 (B)	65	70	75	80	60,77		75	80	
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai		Sesuai	Sesuai	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP		75,00%	72,50%	75,00%	80,00%	85,00%	78,30		80,00%	85,00%	
2	Meningkatkan Investasi		<b>Persentase Peningkatan Nilai Investasi</b>		2,50%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	494,77		2,50%	3,00%	
		Meningkatnya Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)		12,00%	6,00%	9,00%	12,00%	15,00%	44,80		12,00%	15,00%	
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional		20,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	413,51		20,00%	25,00%	
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA		8,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%	857,5		8,00%	10,00%	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik		88,00%	84,00%	86,00%	88,00%	90,00%	85,28		88,00%	90,00%	

### **C. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan visi dan misi Bupati terkait program prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat pada Tabel program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD yang direncanakan merupakan rancangan yang sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikondisikan dengan laporan evaluasi dan monitoring tahun sebelumnya atau n-1 atau tahun 2024 yaitu terdiri dari 6 (enam) Program dengan 13 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.444.541.435 (Empat Milyar Empat Ratus Empat puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) Uraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel T-C.31  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	11	12
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>5,809,753,557</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>4,444,541,435</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	Persentase Capaian Kinerja (%)	71,51%	<b>4,836,991,769</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	Persentase Capaian Kinerja (%)	71,51%	<b>3,847,054,000</b>	
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	91,00%					Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)		91,00%
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>58,000,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>50,000,000</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,500,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7,500,000	
7	Evaluasi Kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13,000,000	Evaluasi Kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5,000,000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>2,587,991,769</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>2,587,992,000</b>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	2,571,991,769	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	2,571,992,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		
	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		
	Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	5,000,000	Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	5,000,000	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	6,000,000	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	6,000,000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5,000,000	

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	
	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10,000,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5,000,000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik</b>	<b>100%</b>	<b>55,000,000</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	ASN		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	ASN	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	ASN		Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	ASN	
	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	
	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang		Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	
	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang		Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	55,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang- undangan	Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang- undangan	Orang	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan administrasi umum kantor</b>	<b>100%</b>	<b>475,000,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan administrasi umum kantor</b>	<b>100%</b>	<b>456,498,000</b>
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15,008,000
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Penyediaan bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	25,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	7,620,000
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	400,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	433,870,000
	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>520,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>200,555,000</b>

	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	320,000,000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit		
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit		
	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	50,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit		
	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	100,000,000	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	200,555,000	
	Pengadaan Aset tetap lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit		Pengadaan Aset tetap lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit		
	Pengadaan aset tak berwujud		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		Pengadaan aset tak berwujud		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		
	Pengadaan Geduang Kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Geduang Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit		Pengadaan Geduang Kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Geduang Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit		
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		
	<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>871,000,000</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>441,789,000</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	160,000,000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	141,748,000	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia	3 Laporan	711,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia	3 Laporan	300,041,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>32 unit</b>	<b>250,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>32 unit</b>	<b>90,220,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	75,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,920,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	50,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	14,820,000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang terpelihara	Unit	50,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang terpelihara	Unit		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	44,480,000	
	Pemeliharaan Aset tetap lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		Pemeliharaan Aset tetap lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		
	Pemeliharaan aset tak berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	25,000,000	Pemeliharaan aset tak berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 unit	50,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)</b>	<b>70%</b>	<b>65,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)</b>	<b>70%</b>	<b>54,468,828</b>	
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota</b>		<b>Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah</b>	<b>20 Perusahaan</b>	<b>65,000,000</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota</b>		<b>Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah</b>	<b>20 Perusahaan</b>	<b>54,468,828</b>	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	65,000,000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	54,468,828	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen		



	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota		Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal	<b>2 Kegiatan</b>	267,966,773	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota		Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal	<b>2 Kegiatan</b>	130,000,000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	267,966,773	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	130,000,000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen		
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Persentase Izin yang diterbitkan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>40,006,015</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Persentase Izin yang diterbitkan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>40,960,559</b>	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan</b>	<b>1500 izin</b>	40,006,015	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan</b>	<b>1500 izin</b>	40,960,559	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	40,006,015	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	40,960,559	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku	Kegiatan Usaha		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku	Kegiatan Usaha		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)</b>	<b>58,000</b>	<b>584,789,000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)</b>	<b>58,000</b>	<b>351,403,468</b>	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	<b>58,000</b>	584,789,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	<b>58,000</b>	351,403,468	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha	94,217,000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha	85,000,000	
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	273,006,000	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	71,403,468	
	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan usaha	217,566,000	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan usaha	195,000,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20,654,580</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten</b>		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	<b>12 Dokumen</b>	15,000,000	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten</b>		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	<b>12 Dokumen</b>	20,654,580	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	15,000,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	20,654,580	

#### **D. Penelaahan Dokumen Perencanaan Bidang Teknis Terkait adalah :**

1. Dalam **peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait usulan** program dan kegiatan terkait Bidang teknis di Dinas Penanaman dan PTSP melalui **Sasaran ke-3 yaitu** Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** Atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal penelaahannya berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui program Program Pendaftaran Kependudukan Program Pencatatan Sipil dan tim teknis lainnya yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik  
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Layanan Pajak, Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Pelayanan STNK pada SAMSAT.
2. Pada **Peningkatan Kerjasama Investasi** Program dan kegiatan terkait dengan Program Promosi Penanaman Modal melalui sasaran ke-2 yaitu **Persentase Peningkatan Nilai Investasi** Program Promosi Penanaman Modal, Program Peningkatan Iklim Investasi, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui Proposal Investasi Kawasan Pariwisata Pulau Pasi Gusung (KP3GS) berkaitan dengan Dinas Pariwisata, Kawasan Minapolitan Selayar (KMS) berkaitan dengan Dinas Dinas Perikanan, dan IPRO Kawasan Industri Selayar (KIS) (Cluster Pengolahan Kelapa Terpadu) berkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

### **E. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki usulan dari pelayanan provinsi, LSM dan asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah provinsi serta usulan Musrenbang kabupaten/kota.

**TABEL T-C.32  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

No.				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Renstra BKPM Tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024.

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

#### **B. Analisis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan**

Renstra Dinas PMPTSP Provinsi dalam Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif merumuskan kebijakan berupa penyediaan pelayanan publik (MPP) agar memudahkan pengguna layanan

dalam memiliki izin, penyederhanaan prosedur perizinan agar lebih efisien, penerapan teknologi informasi untuk memudahkan akses layanan, dan penyediaan layanan konsultasi pengaduan dalam mengatasi persoalan perizinan dan nonperizinan. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan merumuskan kebijakan berupa strategi promosi yang dapat meningkatkan daya tarik investasi, melaksanakan pameran potensi dan peluang investasi daerah dalam dan luar negeri, regulasi daerah yang dapat mengembangkan iklim penanaman modal, membuat dokumen perencanaan penanaman modal daerah, membuat dokumen kajian/peta potensi yang dapat meningkatkan iklim investasi, menyediakan data dan informasi bidang penanaman modal yang valid dan kredibel, melaksanakan kegiatan pemantauan untuk memaksimal realisasi investasi, melakukan pembinaan perusahaan PMA/PMDN untuk penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan melakukan pengawasan penanaman modal untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan PMA/PMDN terhadap ketentuan penanaman modal.

### **C. Tujuan dan Sasaran Ranwal Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pencapaian Visi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 berada pada:

Misi ke 1 : "Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan"

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi (T-1)

Sasaran : Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)

Misi ke 2 : "Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan".

Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman (T-5).

Sasaran :

1. Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)
2. Meningkatnya Usaha Pariwisata (S-7)
3. Meningkatnya usaha Kepelabuhanan (S-8)

**Tabel 3.1.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PMPTSP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan DIS.PMPTSP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2: Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman	a. Sumber daya manusia Dis. PMPTSP yang berkompetensi dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan perizinan masih terbatas b. Sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai c. prasarana serta fasilitas pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai d. Masih Rendahnya pengaduan atas pelaksanaan penanaman modal dan pengaduan proses perizinan yang disampaikan Dinas PMPTSP	1) Minimnya pegawai yang memiliki kompetensi khusus dibidang pelayanan perizinan dan kurangnya pegawai pada Dis. PMPTSP 2) Terbatasnya anggaran yang belum mencukupi kebutuhan dasar kantor 3) Kurangnya pemahaman masyarakat/ perusahaan tentang pentingnya pengaduan atas pelaksanaan penanaman modal dan proses perizinan	a) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung dalam memberikan wawasan melalui Diklat PTSP dan diklat teknis lainnya kepada pegawai Dis. PMPTSP b) Tersedianya APBD c) Tersedianya Layanan Pengaduan <i>online</i> dan <i>offline</i> pada Dinas PMPTSP

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMPTSP**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	75,00 (BB)
			Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	75 (BB)
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	80,00%
2	Meningkatkan Investasi	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	2,50 %
			Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	12,00%
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	20,00%
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	8,00%
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	88,00%

## **D. Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah (PD);
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD;
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-PD;
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD;
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - 4) Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun PD;
  - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
  - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD;
  - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
  - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
  - 4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD; dan
  - 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
  - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
  - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
  - 5) Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
  - 6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
  - 7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
  - 8) Pemindahan Tugas ASN;
  - 9) Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - 10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - 11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - 4) Penyediaan bahan Logistik Kantor;
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 7) Penyediaan Bahan/Material;
  - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD;
  - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD; dan
  - 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 3) Pengadaan Alat Besar;
  - 4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
  - 5) Pengadaan Mebel;
  - 6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 7) Pengadaan aset tetap lainnya;
  - 8) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
  - 9) Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya;
  - 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan

11) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

g. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- 3) Pemeliharaan Mebel;
- 4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- 5) Pemeliharaan Aset tetap lainnya;
- 6) Pemeliharaan aset tak berwujud;
- 7) Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 8) Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

## 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a. Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 2) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional); dan
- 3) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

c. Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur

- 1) Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam.
  - d. Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
    - 1) Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota.
  - e. Kemitraan Usaha Nasional
    - 1) Fasilitas Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar
  - f. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
    - 1) Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
  - g. Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
    - 1) Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
  - h. Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
    - 1) Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
  - i. Kemitraan Usaha Nasional
    - 1) Fasilitas Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar
  - j. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
    - 1) Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal
- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota.

#### 4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah;
  - 2) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
  - 3) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko; dan
  - 4) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

#### 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota
  - 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
  - 2) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku usaha; dan
  - 3) Pengawasan Penanaman Modal.

#### 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota
  - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.



				0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	7,500,000	DAU		1 Dokumen	7,500,000
				0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	7,500,000	DAU		1 Dokumen	7,500,000
				0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	7,500,000	DAU		2 Laporan	7,500,000
2.	18.	1.	2.01	0007	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	13,000,000	DAU		4 Laporan	13,000,000
2.	18.	1.	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>2,587,991,769</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>2,809,402,392</b>
				0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Orang/ Bulan	2,571,991,769	DAU		26 Orang/ Bulan	2,787,402,392
				0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		DAU		Dokumen	
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		DAU		Dokumen	
				0004	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		DAU		Dokumen	
				0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	5,000,000	DAU		1 Laporan	7,000,000
				0006	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		DAU		Dokumen	
				0007	Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		3 Laporan	5,000,000	DAU		3 Laporan	7,000,000
				0008	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12 Dokumen	6,000,000	DAU		12 Dokumen	8,000,000

2.	18.	1.	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>
				0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	5,000,000	DAU		2 Dokumen	5,000,000
				0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		DAU		Dokumen	
				0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		DAU		Laporan	
				0004	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		DAU		Laporan	
				0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	10,000,000	DAU		2 Laporan	10,000,000
				0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	5,000,000	DAU		2 Laporan	5,000,000
				0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		DAU		Dokumen	
2.	18.	1.	2.05		<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik</b>		<b>100%</b>	<b>55,000,000</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>70,000,000</b>
				0001	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		ASN		DAU		ASN	
				0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		ASN		DAU		ASN	
				0003	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen		DAU		Dokumen	
				0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen		DAU		Dokumen	
				0005	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		DAU		Dokumen	
				0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		Orang		DAU		Orang	
				0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Laporan		DAU		Laporan	
				0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan		Orang		DAU		Orang	

				0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	55,000,000	DAU		5 Orang	70,000,000
				0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan		Orang		DAU		Orang	
				0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang- undangan		Orang		DAU		Orang	
2.	18.	1.	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum kantor</b>		<b>100%</b>	<b>475,000,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>480,000,000</b>
				0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		DAU		Paket	
				0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	50,000,000	DAU		Paket	-
				0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		DAU		Paket	
				0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		DAU		Paket	
				0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket		DAU		2 Paket	50,000,000
				0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 Dokumen	25,000,000	DAU		5 Dokumen	30,000,000
				0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan		Paket		DAU		Paket	
				0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan		DAU		Laporan	
				0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan	400,000,000	DAU		200 Laporan	400,000,000
				0010	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen		DAU		Dokumen	
				0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen		DAU		Dokumen	
2.	18.	1.	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan BMD</b>		<b>100%</b>	<b>520,000,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>320,000,000</b>
				0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		unit	320,000,000	DAU		unit	

				0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit		DAU		2 unit	70,000,000
				0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		Unit		DAU		Unit	
				0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		Unit		DAU		Unit	
				0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		15 unit	50,000,000	DAU		15 unit	50,000,000
				0006	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 unit	50,000,000	DAU		4 unit	100,000,000
				0007	Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		unit		DAU		unit	
				0008	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit		DAU		unit	
				0009	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia		Unit		DAU		Unit	
				0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	100,000,000	DAU		1 unit	100,000,000
				0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		DAU		Unit	
2.	18.	1.	2.08		<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>871,000,000</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>925,000,000</b>
				0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		DAU		Laporan	-
				0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	160,000,000	DAU		3 Laporan	150,000,000
				0003	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan		DAU		Laporan	
				0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia		3 Laporan	711,000,000	DAU		3 Laporan	775,000,000
2.	18.	1.	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>		<b>32 unit</b>	<b>250,000,000</b>	DAU		<b>32 unit</b>	<b>270,000,000</b>
				0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	75,000,000	DAU		1 Unit	75,000,000

				0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	50,000,000	DAU	20 unit	60,000,000
				0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	Unit	-	DAU	Unit	
				0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	50,000,000	DAU	5 Unit	35,000,000
				0007	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		DAU	Unit	
				0008	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	25,000,000	DAU	Unit	25,000,000
				0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		DAU	Unit	
				0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50,000,000	DAU	1 unit	75,000,000
				0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		DAU	Unit	
<b>VISI : KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA</b>											
<b>MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN POTENSI KELAUTAN</b>											
<b>TUJUAN : MENINGKATKAN INVESTASI</b>											
					<b>Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)</b>			<b>12%</b>			<b>15%</b>
					<b>Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional</b>			<b>20%</b>			<b>25%</b>
2.	18.	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)</b>	<b>70%</b>	<b>53,199,489</b>	DAU	<b>70%</b>	<b>54,468,828</b>
2.	18.	2	2.01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah</b>	<b>20 Perusahaan</b>	<b>53,199,489</b>	DAU	<b>20 Perusahaan</b>	<b>54,468,828</b>
				0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	53,199,489	DAU	2 Dokumen	54,468,828
				0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen		DAU	Dokumen	

				0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Dokumen		DAU		Dokumen		
2.	18.	2	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>1 dokumen</b>		<b>-</b>	DAU		<b>1 dokumen</b>	<b>-</b>
				0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		DAU		Dokumen		
				0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		Dokumen		DAU		Dokumen		
				0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Dokumen		DAU		Dokumen		
2.	18.	2	3.03		<b>Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur</b>		Badan Usaha		<b>-</b>	DAU		Badan Usaha	<b>-</b>
				0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan		Badan Usaha		DAU		Badan Usaha		
2.	18.	2	3.04		<b>Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		<b>Badan Usaha</b>		<b>DAU</b>		<b>Badan Usaha</b>		
				0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota		Badan Usaha		DAU		Badan Usaha		
2.	18.	2	3.05		<b>Kemitraan Usaha Nasional</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar</b>		UMKM		<b>-</b>	DAU		UMKM	<b>-</b>
				0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar		UMKM		DAU		UMKM		
2.	18.	2	3.06		<b>Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.</b>	<b>Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</b>		Laporan		<b>-</b>	DAU		Laporan	<b>-</b>

				0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		Laporan		DAU		Laporan	
2.	18.	2	4.03		<b>Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur</b>		Badan Usaha	-	DAU		Badan Usaha	-
				0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan		Badan Usaha		DAU		Badan Usaha	
2.	18.	2	4.04		<b>Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		Badan Usaha	-	DAU		Badan Usaha	-
				0001	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota		Badan Usaha		DAU		Badan Usaha	
2.	18.	2	4.05		<b>Kemitraan Usaha Nasional</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar</b>		UMKM	-	DAU		UMKM	-
				0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar		UMKM		DAU		UMKM	
2.	18.	2	4.06		<b>Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.</b>	<b>Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</b>		Laporan	-	DAU		Laporan	-
				0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		Laporan		DAU		Laporan	

2.	18.	3			<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Investor PMDN/PMA</b>		<b>24 Investor</b>	<b>267,966,773</b>	DAU		<b>26 Investor</b>	<b>274,360,460</b>
2.	18.	3	2.01		Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal		<b>2 Kegiatan</b>	267,966,773	DAU		<b>2 Kegiatan</b>	274,360,460
				0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen	267,966,773	DAU		1 Dokumen	274,360,460
				0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		Dokumen		DAU		Dokumen	
2.	18.	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Izin yang diterbitkan (%)</b>		<b>100%</b>	<b>40,006,015</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>40,960,559</b>
2.	18.	04	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan</b>		<b>1500 izin</b>	40,006,015	DAU		<b>1600 izin</b>	40,960,559
				0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		DAU		Dokumen	
				0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		1500 Pelaku Usaha	40,006,015	DAU		1500 Pelaku Usaha	40,960,559
				0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Pelaku Usaha		DAU		Pelaku Usaha	
				0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku		Kegiatan Usaha		DAU		Kegiatan Usaha	
2.	18.	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)</b>		<b>58,000</b>	<b>343,214,373</b>	DAU		<b>60,000</b>	<b>351,403,468</b>
2.	18.	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)		<b>58,000</b>	343,214,373	DAU		<b>60,000</b>	351,403,468

				0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Kegiatan usaha	85,000,000	DAU		Kegiatan usaha	85,000,000
				0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Pelaku Usaha	63,214,373	DAU		Pelaku Usaha	71,403,468
				0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		Kegiatan usaha	195,000,000	DAU		Kegiatan usaha	195,000,000
2.	18.	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)</b>		<b>100%</b>	<b>20,173,246</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>20,654,580</b>
2.	18.	6	2.		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten</b>	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		<b>12 Dokumen</b>	20,173,246	DAU		<b>12 Dokumen</b>	20,654,580
				0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		12 Dokumen	20,173,246	DAU		12 Dokumen	20,654,580

Dalam Rencana Awal Tahun 2025 terdiri dari 6 Program yaitu 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 8 kegiatan 12 Sub kegiatan, 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, 3. Program Promosi Penanaman Modal terdiri 1 Kegiatan dan dari 2 Sub kegiatan, 4. Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Dari uraian tersebut diatas Program dan kegiatan tidak ada yang berubah sesuai dengan rencana kerja awal sedangkan pagu indikatif di rencana awal yaitu sebesar Rp. 5.561.551.665,- sedangkan di Rencana akhir tahun 2025 pagu indikatifnya senilai **Rp. 4.805.053.000,-**.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

#### **A. Rencana Kerja**

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. Rencana kerja di susun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja (RKA-Perangkat Daerah) pada tahun berkenaan.

Rencana kerja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Adapun Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Berikut:

1. Rencana Program Prioritas Utama
  - a. Program Promosi Penanaman Modal
  - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Rencana Program Reguler (urusan dasar)
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota
  - b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

#### **B. PENDANAAN**

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra OPD berdasarkan pagu indikatif, adapun dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan disajikan pada lampiran.

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						<b>4.805.053.000,00</b>								<b>5.694.250.287,00</b>	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.805.053.000,00								5.694.250.287,00	
	-	-						4.805.053.000,00								5.694.250.287,00	
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Potensi untuk Peluang Investasi Daerah (Penunjang)</i>	-			70 %	65.000.000,00						-	54.468.828,00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah</i>	-			20 Perusahaan	65.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	PELAKU USAHA	-	54.468.828,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal															
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	PELAKU USAHA		54.468.828,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	PELAKU USAHA		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	PELAKU USAHA		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Peta Potensi Investasi Kab/Kota</i>	-			1 Dokumen	0,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>				0 Daerah	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<i>Jumlah Investor PMDN/ PMA (Prioritas)</i>	-			32 Investor	130.000.000,00						-	274.360.460,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah investor PMA/ PMDN</i>	-			32 Investor	130.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR	-	274.360.460,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR		274.360.460,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<i>Persentase Izin Usaha dan investasi yang dikeluarkan (Penunjang) Persentase Izin yang Diterbitkan</i>	-			100 % 100 %	163.210.000,00						-	40.960.559,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan Persentase Izin yang diterbitkan	-			2200 Izin 2500 Izin 100 %	163.210.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	-	40.960.559,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	34.992.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	65.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA		40.960.559,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	50.618.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				2 Kegiatan Usaha	12.600.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan	MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) (Prioritas)</b>	-			58000 Juta Rupiah	584.789.000,00						-	351.403.468,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) juta rupiah</i>	-			74500 Juta	584.789.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR/ PELAKU USAHA	-	351.403.468,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				7 Kegiatan Usaha.	94.217.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR/ PELAKU USAHA		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				204 Pelaku Usaha	273.006.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR/ PELAKU USAHA		71.403.468,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				13 Kegiatan Usaha	217.566.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	INVESTOR/ PELAKU USAHA		195.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b><i>Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (Prioritas)</i></b>	-			100 %	15.000.000,00						-	20.654.580,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase permintaan data dan informasi yang diterima</i>	-			100 %	15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan	ASN DINAS PMPTSP	-	20.654.580,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan	ASN DINAS PMPTSP		20.654.580,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	-	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b><i>Persentase Capaian Kinerja Keuangan Persentase Capaian Kinerja</i></b>	-			91.00 % 71.51 %	3.847.054.000,00						-	4.952.402.392,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian</i>	-			100 %	0,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	456.498.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	480.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	15.008.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	7.620.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				195 Laporan	433.870.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran yang Tersedia</i>	-			100 %	200.555.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				15 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	200.555.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran</i>	-			100 %	441.789.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	925.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	141.748.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu</i>	-			10 Dokumen 100 %	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	58.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran Daerah</i>	-			100 %	441.789.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	925.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	300.041.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		775.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD dalam kondisi baik</i>	-			100 %	90.220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	270.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	30.920.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	14.820.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	44.480.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran</i>	-			100 %	441.789.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	925.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu</i>	-			10 Dokumen 100 %	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	58.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Peningkata n tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	2.587.992.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	2.809.402.392,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				24 Orang/bulan	2.571.992.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		2.787.402.392,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Adminstrasi Barang Milik Daerah</i>	-			100 %	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	2.587.992.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	2.809.402.392,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian</i>	-			100 %	0,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP	-	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	ASN DINAS PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>J U M L A H</b>								<b>4.805.053.000,00</b>							<b>5.694.250.287,00</b>	

Dalam Rencana Awal Tahun 2025 terdiri dari 6 Program yaitu 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp. 5.561.551.665 terdiri dari 8 kegiatan 27 Sub kegiatan, 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Rp. 53.199.489 yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, 3. Program Promosi Penanaman Modal adalah Rp. 267.966.773 terdiri 1 Kegiatan dan dari 2 Sub kegiatan, 4. Program Pelayanan Penanaman Modal adalah Rp. 40.006.015 yang terdiri dari 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Rp. 343.214.373 yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, 6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah Rp 20.173.246 yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. sehingga total anggaran sebesar Rp. Rp. 5.561.551.665 (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). dan sumber pendanaannya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Renja bertujuan menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan Sumber Daya Manusia di tahun 2025 sangat dibutuhkan penambahan anggaran sehingga peningkatan pelayanan dan kompetensi sumber daya aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat akan lebih meningkat. Dengan demikian Setiap bagian dan bidang akan menyusun rencana dan langkah-langkah persiapan pelaksanaannya sehingga RANWAL Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 ini dapat diwujudkan secara optimal.

#### **B. Rencana Tindak Lanjut**

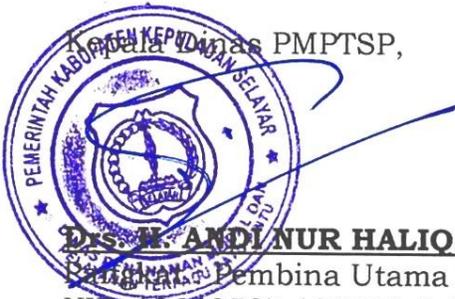
Rencana tindak lanjut Dinas PMPTSP dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mencapai tujuan sasaran program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 maka Dinas PMPTSP telah dan akan melanjutkan beberapa program unggulan yang inovatif dalam peningkatan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:

1. IPRO (Investment Project Ready to Offer) **Kawasan Pariwisata Pulau Pasi Gusung (KP3GS)** memperoleh Juara 3 dalam Ajang **South Sulawesi Investment Challenge (SSIC)** adalah proposal Investasi yang bertujuan memberikan informasi Potensi Investasi Kabupaten Kepulauan Selayar yang kemudian di dukung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyusunan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Bira - Takabonerate;
2. IPRO (Investment Project Ready to Offer) **Kawasan Minapolitan Selayar (KMS)**;

3. IPRO (Investment Project Ready to Offer) **Kawasan Industri Selayar** (Cluster Pengolahan Kelapa Terpadu);
4. Rehabilitasi Gedung dan penyiapan sarana dan prasarana **Mal Pelayanan Publik (MPP)** Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. **Saya Pria Cakep** (Sistem Pelayanan Perizinan Mobile Kecamatan Kepulauan) Penyiapan Sarana dan Prasarana penerbitan perizinan;
6. **Sistem Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan** bertujuan mengatasi persoalan Investor dalam terkait perizinan berusaha;
7. **Pameran Investasi** bertujuan menyebarluaskan potensi Investasi Kabupaten Kepulauan Selayar agar investor menanamkan modalnya.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar di atas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 10 Juni 2024

Kepala Dinas PMPTSP,  
  
**Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.**  
Pembina Pembina Utama Muda  
NIP. 19660507 198603 1 022